BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Pertambangan
Edisi : 04 Maret 2008
Halaman : 22

PERTAMBANGAN

Lahan Pengganti Sulit Dicari di Daerah yang Didominasi Hutan

Palangkaraya, Kompas - Lahan kompensasi untuk usaha pertambangan di kawasan hutan sulit dicari di daerah yang wilayahnya masih didominasi hutan, seperti di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.

”Sebagian besar wilayah di Murung Raya masih berstatus hutan,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Murung Raya, Sipet Hermanto, Senin (3/3) di Palangkaraya.

Menurut Sipet Hermanto, dari luas wilayah Murung Raya sekitar 2,3 juta hektar, 90 persen di antaranya masih berupa kawasan hutan; baik hutan lindung maupun hutan produksi terbatas. Dari luas wilayah itu, hanya sekitar 10 persen yang berupa kawasan pengembangan produksi (KPP) serta kawasan permukiman dan peruntukan lain (KPPL).

Padahal, lanjut Sipet Hermanto, areal kompensasi harus diberikan dari KPP atau KPPL. Di sisi lain, luas nonhutan yang 10 persen itu pun sudah tidak memenuhi untuk mengakomodasi kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan dalam arti luas atau pertanian.

”Ini menjadi persoalan bagi Murung Raya untuk bisa mengakomodasi kompensasi dua kali lipat peraturan pinjam pakai,” ucap Sipet.

Sipet menuturkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2006, ada ketentuan bahwa, terkait pinjam pakai kawasan hutan, perusahaan tambang wajib menyediakan areal kompensasi seluas dua kali wilayah yang dipinjampakaikan. Namun, ada catatan, luas yang dikompensasikan bebas dari kepentingan lain.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 2/2008, apabila tidak punya lahan pengganti, perusahaan pertambangan akan dikenai pendapatan negara bukan pajak. Namun, PP tersebut hanya untuk 13 perusahaan tambang, seperti diatur dalam PP Pengganti Undang-undang No 1/2004.

”Bagi daerah seperti Murung Raya yang masih didominasi hutan, sepertinya butuh peraturan pemerintah seperti PP Nomor 2 Tahun 2008, tetapi yang berlaku umum, tidak hanya untuk 13 perusahaan tambang,” kata Sipet.

Dia menuturkan, ada beberapa perusahaan pertambangan di Murung Raya yang sedang memproses pinjam pakai. Usaha tambang di Murung Raya umumnya menghindari eksploitasi di hutan lindung. ”Mereka hanya minta di hutan produksi. Mungkin karena belum dapat gambaran ekonomis tidaknya menambang di hutan lindung,” katanya. (CAS)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup